

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat.

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara barat bersifat *elitis* dan *aristokratis*, dengan artian partai politik bertujuan mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke dalam segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat.

Konsep partai politik selalu dihubungkan dengan masyarakat didalamnya, karena pada hakikatnya partai politik adalah media sarana masyarakat dalam menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka terhadap pemerintah. Partai politik juga merupakan suatu organisasi politik yang terbentuk atas aktifitas sosial masyarakat.

Perjalanan proses pembangunan dalam pendidikan politik tidak selamanya mampu memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di pedesaan. Pembangunan dalam pendidikan politik yang dilakukan di masyarakat desa akan menimbulkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat itu

sendiri. Pendapat ini berlandaskan pada asumsi pembangunan itu adalah proses perubahan (sosial dan budaya).

Untuk menyukseskan perubahan sosial politik pertama-tama sistem politik harus mampu mengintroduksi kebijakan baru, yaitu melaksanakan penataan kembali bidang kehidupan sosial, ekonomi maupun politik berdasarkan keputusan negara. Didalam konteks ini reformasi biasanya mengandung arti adanya perubahan nilai-nilai dan pola-pola perilaku tradisional, perluasan jaringan komunikasi dan pendidikan, meluasnya ruang lingkup orientasi pada masyarakat desa dan suku menuju kesetiaan nasional, sirkulasi kehidupan umum, rasionalisasi struktur kekuasaan, pembentukan organisasi-organisasi fungsional khusus, serta peningkatan distribusi sumber daya material dan simbolis menurut cara-cara yang lebih rasional.

Partai politik menjadi bagian birokrasi struktural penting dalam kemajuan politik negara serta juga partai politik menjadi pemain utama dalam setiap pendidikan politik bagi masyarakat terutama masyarakat desa yang masih belum mengenal konsep politik modern akibat nilai tradisionalnya. Adapun peran partai politik dalam masyarakat berkembang juga menjadi sangat vital, mengingat peran dan fungsi partai politik menjadi sebuah kunci akan berhasil atau tidaknya pengamalan peran dan fungsi partai dalam pendidikan masyarakat desa tersebut.

Selain sebagai rekrutmen politik, media komunikasi politik, pengontrol konflik, sosialisasi politik, serta partisipasi politik. Partai politik juga memiliki fungsi pokok didalamnya, salah satunya adalah sebagai pemain dibarisan terdepan yang berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat

khususnya masyarakat pedesaan. Sedangkan pendidikan politik disini bukan hanya dimaknai sebagai proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi warga/masyarakat untuk menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter.

Partai politik pertama di Indonesia ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo dan Syarikat Islam. Setelah kedua partai ini berdiri, disusunlah partai-partai politik lain, seperti Partai Komunis Indonesia (1920) yang dipimpin oleh Semaun, Partai Nasional Indonesia (1927) oleh Soekarno, Partai Indonesia (1931), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), tahun 1937 yang diketuai oleh Drs. A.K Gani, Partai Persatuan Indonesia oleh Moh. Yamin sebagai pecahan Gerindo, Partai Indonesia Raya (1931), selain itu lahir pula organisasi keagamaan yang menyerupai Partai seperti Nahdhatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah (Basrowi dkk, 2012:55).

Dinamika kepartaian di Indonesia semakin memunculkan eksistensinya dalam setiap aktifitas politik khususnya dalam setiap pelaksanaan Pemilu, selain Indonesia menganut system *Multy Party* Indonesia juga merupakan suatu negara yang sedang mengalami masa perkembangan Demokrasi, hal itu terlihat setelah munculnya masa reformasi yang dilalui indonesia dari mulai berhentinya era orde baru pada tahun 1998, Indonesia masih mengalami masa reformasi sampai sekarang. Hal itu terbukti dimana banyaknya partai-partai politik yang berkembang di Indonesia dengan berbagai ideologinya, seperti dalam pemilihan langsung presiden pada tahun 2004, 2009 sampai dengan 2014, tercatat banyaknya partai-

partai baru yang berdatangan dalam perebutan siklus kekuasaan di Indonesia seperti Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra dan yang terakhir Partai Nasional Demokrasi (NasDem).

Partai-partai baru yang muncul dan ikut berpartisipasi dalam pentas demokrasi di Indonesia tidaklah hanya sebagai peramai dan media koalisi partai besar saja, terbukti beberapa partai baru yang sudah mengikuti pemilu langsung di Indonesia baik dari tahun 2004, 2009 sampai dengan 2014 sekarang bukanlah tanpa pengalaman dan strategi politik, melainkan mereka mampu mengangkat partisipasi masyarakat dalam kurun waktu beberapa bulan. Elektabilitas partai baru seperti Partai Gerindra dan NasDem semakin naik dari setiap tahunnya terutama bagi partai NasDem yang lahir 3 tahun yang lalu ini, atau yang lebih spesifiknya Partai NasDem diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011.

Partai NasDem pada tahun 2014 ini, sudah banyak membuka sekretariat yang terpencar diberbagai wilayah di Indonesia, partai NasDem sama seperti halnya partai lain memiliki struktur organisasi didalamnya serta juga memiliki struktur sekretariat yang menghubungkan komunikasi politik anggotanya dari DPP, DPW, DPD, DPC, sampai wilayah Ranting sekalipun. Partai NasDem sangat menjaga keutuhan visi misi dan ideologinya serta tetap menjalankan konsistensi dan konsensus politiknya dalam setiap komunikasi politik pada struktur sekretariatnya yang masih berjalan dengan baik.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah salah satu bagian struktur sistem kepartaian yang berkembang di Indonesia, DPC berada langsung dibawah komando

DPD yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sarana struktur partai NasDem yang bertugas dalam wilayah kecamatan, DPC berperan dalam sirkulasi politik kepartaian serta juga memiliki peranan penting dalam setiap sosialisasi politik partai, karena DPC memegang mandat yang disahkan oleh DPP serta DPD dalam kekuasaan teritorial di daerah kecamatan, maka secara otomatis DPC lah satu-satunya struktur partai yang dekat atau terlibat langsung dengan aktifitas masyarakat pedesaan dan DPC jugalah yang menjalankan peran penting fungsional partai dalam sosialisasi politik, komunikasi politik sampai pengangkatan partisipasi politik masyarakat desa dalam aktifitas pemilihan umum (sumber: wawancara yang dilaksanakan pada Pkl 18:00 wib/11/Oktober/2014 di kantor DPC Partai NasDem Kecamatan Rancaekek).

Begitu pula dengan tujuan penelitian ini, dimana optimalisasi peran dan fungsi partai politik dalam menjalankan sebagian fungsinya terhadap masyarakat pedesaan yang umumnya masih memegang nilai budaya tradisional didalamnya dalam memberikan pendidikan politik lewat partisipasi dan sosialisasi politik dalam pemilihan umum legislatif menjadi sebuah peran fungsional yang wajib dijalankan partai politik. Khususnya peran salah satu struktur sekretarian kepartaian yaitu DPC atau Dewan Pimpinan Cabang yang sangat dekat dengan aktifitas masyarakat secara langsung menjadi salah satu strategi urgen dalam setiap perebutan kekuasaan yang selalu dimamfaatkan oleh calon-calon legislatif maupun eksekutif partai sekalipun dalam memperoleh simpati suara di daerahnya.

Peran partai politik khususnya DPC partai NasDem di Rancaekek berhasil menjalankan fungsional partai politiknya, dimana kontribusi politik yang

diberikannya mengalir dalam komunikasi masyarakat sekitar, hal itu terbukti dengan kemenangan salah satu calon legislatif partai NasDem tersebut yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2014 di daerah pilihan 4 Rancaekek, berhasil memperoleh suara yang tinggi dan naik dalam parlemen pemerintahan daerah akibat peranan sosialisasi politik yang dilakukan partai politik. Strategi Politik DPC partai NasDem terhadap masyarakat sekitar berjalan dengan baik dan masyarakat sekitar pun merasa lebih mengenal atau lebih memahami pendidikan politik dalam peranan atau kontribusi partai politik khususnya DPC partai NasDem yang mereka rasakan.

Maka berdasarkan penelusuran diatas, mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang **FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT PEDESAAN** (*Studi Deskriptif Sosiologi Politik pada DPC Partai NasDem Rancaekek*).



1.2 Identifikasi Masalah

Partai politik didalam fungsinya bertugas memberikan pendidikan politik umumnya kepada semua lapisan masyarakat khususnya kepada masyarakat pedesaan yang masih kurang memahami tentang aktifitas atau pendidikan politik untuk bernegara. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat pedesaan disaat kampanye atau menjelang pesta demokrasi saja, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus. Pendidikan politik sebagai aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik bagi masyarakat itu haruslah bisa dioptimalisasikan dalam setiap fungsi partai politik termasuk peran DPC dalam sebuah mekanisme sistem organisasi haruslah bisa menjadikan sebuah akses bagi masyarakat pedesaan dalam setiap pendidikan politiknya baik secara komunikasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik maupun sosialisasi politiknya yang bisa diaplikasikan masyarakat pedesaan dalam berbangsa dan bernegara yang baik dan benar.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan DPC partai politik NasDem dalam mengubah karakter politik masyarakat desa di Rancaekek kabupaten Bandung ?
2. Bagaimanakah perubahan sosial politik yang terjadi di masyarakat Rancaekek kabupaten Bandung dalam peranan DPC partai NasDem ?

3. Bagaimanakah strategi DPC partai politik NasDem dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Rancaekek kabupaten Bandung ?
4. Bagaimana persepsi masyarakat desa di Rancaekek terhadap eksistensi DPC partai politik NasDem ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kegiatan DPC partai politik NasDem dalam mengubah karakter politik masyarakat Desa di Rancaekek Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui perubahan sosial politik yang terjadi di masyarakat Rancaekek kabupaten Bandung dalam peranan DPC partai NasDem.
3. Untuk mengetahui strategi DPC partai politik NasDem dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Rancaekek kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa di Rancaekek terhadap eksistensi DPC partai politik NasDem .

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, kegunaan atau manfaat yang diharapkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Kegunaan Akademis*, penelitian ini secara teoritis (akademis) akan memberikan sumbangan terhadap keilmuan sosiologi politik terkait dengan fungsi partai politik sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.
2. *Kegunaan Praktis*, penelitian ini akan memberikan penjabaran kepada setiap struktur yang ada pada partai politik dalam mengoptimalkan

fungsinya sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat serta terhadap masyarakat agar bisa memanfaatkan atau menangkap secara evaluatif nilai-nilai yang diberikan setiap organisasi yang ada tidak terkecuali partai politik didalamnya agar masyarakat bisa menjadi masyarakat yang mempunyai pendidikan politik dan pintar dalam pemilihan wakilnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Partai politik merupakan salah satu unit terpenting dalam proses demokrasi, dimana partai politik menghubungkan serta melibatkan langsung rakyat dalam proses aktifitas politiknya. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintahan. Bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern (Surbakti, 1992:115).

Pendapat tersebut dimaksudkan bahwa partai politik tidak hanya diasumsikan sebagai lembaga politik yang hanya mengurus tentang mekanisme perebutan dan pertahanan suatu kekuasaan kaum elit saja, melainkan partai politik haruslah melakukan evaluasi fungsional partai yang dimana hakikat partai politik lahir tidak lain bertugas untuk menjadi akses penghubung antara rakyat dan pemerintahan serta juga partai politik memiliki mandat peran sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat demi terciptanya suatu masyarakat demokratis yang memahami pendidikan politik dari partai dan mengaplikasikannya dalam aktifitas politik masyarakat yang beretika. Partai politik juga harus mampu menjadi

sebuah sistem dalam masyarakat dengan memberikan nilai-nilai dan norma politik yang dapat disosialisasikan terhadap masyarakat.

Karena masih memunculkan perdebatan yang sangat kompleks dalam memberikan pengertian pasti terhadap partai politik, maka diperlukannya suatu pembatasan dalam definisi partai politik tersebut. Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah sebagai organisasi penghubung yang terdiri atas para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang serta juga menaruh perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat (Basrowi, 2012:48)

Definisi yang tidak jauh berbeda dari definisi partai politik diatas diberikan oleh Mark N. Hogopain yang mendefinisikan bahwa partai politik adalah sebagai organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu dalam pemilihan (Mufti, 2013:239).

Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya didalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dan oleh karena itu pula, penataan kepartaian harus bertumpu pada kedaulatan rakyat yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, pendidikan politik dan kebersamaan.

Di Indonesia sendiri, partai politik telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar RI pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2008, mendefinisikan partai politik adalah sebagai organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fungsi didalam *Kamus Oxford Dictionary* (1982) sendiri diartikan *Actor's part; one's task or function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), fungsi adalah suatu bagian atau kegunaan suatu hal dari program yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang menghasilkan suatu nilai atau guna untuk dikembalikan kembali. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:119).

Mengenai fungsi, Talcot Parson menjelaskan fungsi atau fungsionalisme struktural adalah sebagai kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem, didalamnya tidak ada unsur yang sama sekali terpisah satu dari yang lainnya, semua unsur saling membutuhkan, tujuannya untuk mengarahkan kepada keseimbangan, sedangkan keseimbangan itu mempertahankan dirinya, karena apabila terjadi perubahan dalam unsur yang satu akan mempengaruhi unsur-unsur yang lain. Dengan definisi seperti itu Parson yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan oleh sebuah sistem, karena pada dasarnya tiap-tiap sistem akan menghadapi empat masalah yang harus dicegah agar fungsi itu tidak lenyap, empat fungsi yang dibutuhkan oleh sistem yaitu: *Adaptation*

(adaptasi): Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan): Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuannya. *Integration* (integrasi): Sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (*Adaptation, Goal Attainment, dan Latency*). *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Talcot Parson mendesain skema A.G.I.L ini untuk dipergunakan disemua tingkat dalam sistem teoritisnya, tentang bahasan keempat sistem tindakan. Parson mencontohkan penggunaan skema A.G.I.L tersebut dengan sebuah contoh dalam sebuah sistem tindakan. *Pertama*, Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal. *Kedua*, Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. *Ketiga*, Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. *Keempat*, Sistem kultural, melaksanakan fungsi pemeliharaan pola-pola dengan menyediakan aktor sebagai seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer, Douglas J. Goodman, 2010:121).

Dari konsep tersebut diterangkan bahwa diantaranya fungsi dari suatu organisasi sosial politik yang menjalankan suatu sistem sosial dalam hal ini partai

politik sangat penting sekali terhadap pemenuhan kebutuhan intelektual bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, melalui pendidikan politik yang diberikan partai politik lewat pengamalan fungsi-fungsinya. Hal ini merupakan tanggung jawab partai politik yang harus diberikan kepada seluruh anggota masyarakat sehingga partai politik ditekankan harus mengerti akan fungsi dan pengabdianya serta tentunya pemahaman tentang pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, dalam hal fungsi, tokoh aliran struktural fungsional lainnya seperti Robert King Merton mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan telah menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem-sistem tertentu (P. Johnson, 1990:147).

Selain itu Merton juga membuat perbedaan terkenal tentang fungsi yaitu “fungsi nyata” (*manifest function*) dan “fungsi tersembunyi” (*latent function*). Fungsi disebut nyata, apabila konsekuensi tersebut disengaja, dimaksudkan atau setidaknya dijalankan karena diketahui. Adapun fungsi disebut tersembunyi, apabila konsekuensi tersebut secara obyektif ada tetapi tidak (belum) diketahui (Nazsir, 2008:14).

Konsep fungsi lain yang disajikan oleh Merton, dipahami sebagai suatu konsekuensi yang dapat diamati dalam sebuah struktur sosial terhadap kaitannya dengan partai politik, hal ini tentu dapat menjadi sebuah mata uang yang berlawanan, dimana menurut Merton fungsi dibedakan menjadi dua *fungsi manifest* atau fungsi nyata, dimana partai politik memiliki fungsi nyata didalamnya seperti fungsi asli partai dalam mengamalkan pendidikan politik bagi masyarakat, menjadi sarana

penghubung masyarakat dan pemerintahan serta menjadi sebuah perebut dan pemertahan kekuasaan, sementara itu adapula yang menjadi fungsi yang kedua yaitu *fungsi latent* atau fungsi yang tersembunyi, fungsi itu dimiliki oleh struktur sosial maupun politik namun belum diketahui maknanya seperti partai politik sebagai media solidaritas sosial masyarakat.

Setiap fungsi tentu akan memberikan dampak berupa sebuah persepsi didalamnya, tidak terkecuali fungsi-fungsi dari sistem sosial maupun organisasi politik seperti partai politik. Fungsi-fungsi dari partai politik tersebut akan mengakibatkan sejumlah persepsi sosial dari masyarakat sekitar. Persepsi itu sendiri, adalah sejenis aktifitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi seorang individu atau kelompok (masyarakat) merupakan proses pencapaian pengetahuan, pendidikan dan proses berfikir tentang orang lain maupun struktur organisasi partai politik.

Menurut Starbuck dan Mezias (1996), persepsi sosial atau persepsi interpersonal dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemahaman seseorang terhadap suatu realitas sosial. Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap persepsi sosial, Robbin (1989) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan suatu persepsi sosial seseorang. Faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (Hanurawan, 2010:34).

Dalam konsep diatas, dapat disimpulkan kembali bahwa setiap sistem sosial pasti memiliki organisasi didalamnya yang mengubah perilaku individu dan kelompok dalam setiap nilai dan aturan didalamnya, organisasi sosial dalam hal ini

partai politik juga dapat memengaruhi perilaku individu maupun kelompok dengan azas ideologi yang dianutnya, partai politik sebagai organisasi politik juga memiliki fungsi-fungsi pendidikan politik bagi masyarakat didalamnya, dan setiap fungsi itu akan disosialisasikan kedalam karakteristik masyarakat, dalam hal inilah proses persepsi sosial dimulai dimana, masyarakat akan berinteraksi terhadap eksistensi, nilai-nilai aturan serta fungsi-fungsi partai politik dilingkungannya serta dari hasil persepsi itu pula masyarakat akan memberikan sebuah tanggapan tentang optimalisasi fungsi partai politik tersebut.

Seperti yang disimpulkan diatas bahwasanya suatu keberadaan organisasi politik tentunya memiliki struktur dan setiap struktur itu pastilah memiliki peran dan fungsi didalamnya seperti apa yang dikemukakan oleh Firmanzah yang menjabarkan secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. *Kedua*, parpol juga bersifat eksternal organisasi. Disini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Efriza, 2012:226).

Dwight King menyatakan peran utama partai politik terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Memberikan jembatan institusional antara warganegara dan pemerintah.

2. Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu.
3. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik.

Sedangkan menurut Gaffar dan Amal, dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan yaitu :

1. Sebagai proses pendidikan politik.
2. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara.
3. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.
4. Sebagai penghubung antara penguasa dengan rakyat.

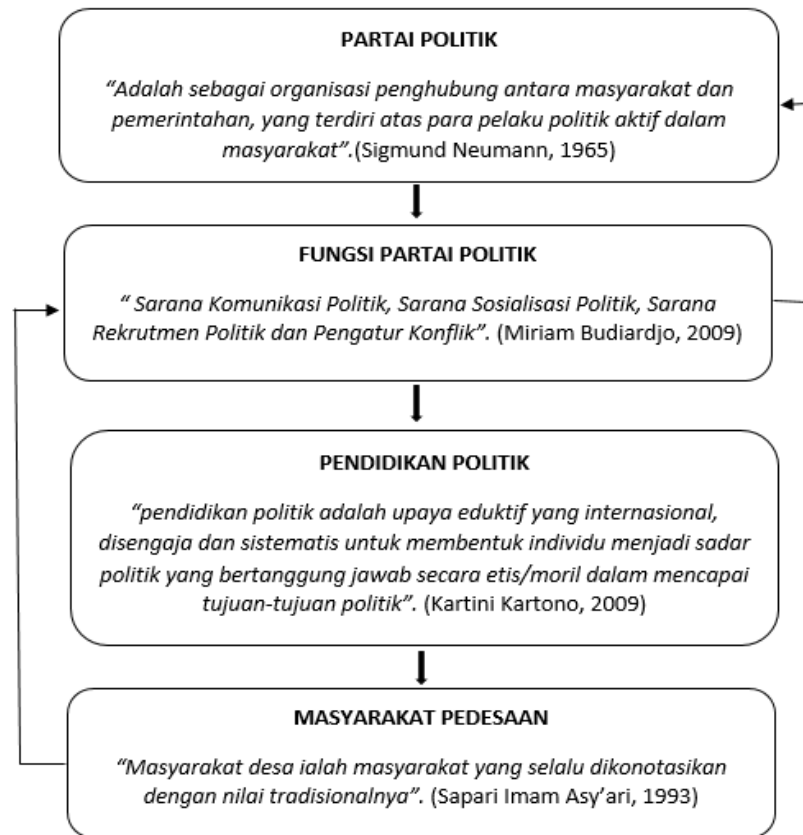
Selain daripada itu, konsep partai dan sistem kepartaian juga dijelaskan oleh Seydou Kouyate menjelaskan bahwa organisasi politik atau dalam hal ini partai politik berperan dan berfungsi sebagai wadah perpaduan dimana warga desa dan masyarakat kota bertemu menjadi satu. Ia harus mampu membuka keterasingan masyarakat desa dan mencapai solidaritas nasional yang lantas kian memperkokoh keberadaannya. Dengan begitu, jurang pemisah diantara keduanya telah diisi secara positif sedangkan berbagai strata sosial masyarakat dipersatukan kedalam satu aliran yang berorientasi pada upaya pencapaian tujuan-tujuan politik yang sama (Huntington, 2004:514).

Fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi politik (partai Politik) merupakan suatu pembangunan politik dan menciptakan suatu perubahan sosial

politik dalam masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang berkembang, mengingat, dengan adanya peran partai politik dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat akan memberikan dampak sosial positif negatif didalamnya tergantung bagaimana peran dan fungsi partai politik tersebut dapat secara optimal diinterpretasikan oleh masyarakat sekitar, dan bagaimana pula strategi partai politik tersebut dapat membangun kualitas masyarakat yang dari pasif politik menjadi aktif politik melalui pendidikan politik dalam setiap sendi-sendi fungsinya.

Fungsi itu dapat diukur dari besarnya kontribusi partai kepada masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan, atau cara beroperasinya sistem politik. Hal ini mencakup dua pertimbangan utama, yaitu manfaat sistem kepartaian dalam mengumpulkan dan menyalurkan berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat pedesaan kedalam proses politik, dan kemudian, sampai pada kontribusi pendidikan politik masyarakat pedesaan yang berasal dari fungsi sosial dan partai politik itu sendiri.

Uraian mengenai fungsi-fungsi partai politik diatas, maka jelaslah bahwa fungsi-fungsi ini semuanya memegang peranan penting dalam pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok yang menjadi bangsa negara. Untuk itu dalam penerapannya hendaknya fungsi-fungsi tersebut berjalan secara seimbang, karena akan membantu peningkatan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik ini disertai dengan komunikasi yang baik serta konsisten yang tinggi.



Gambar 1.1: Skema Proses Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan

Politik Bagi Masyarakat Pedesaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG